

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PANTAI KELAPA KELURAHAN PANYURAN KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

Kusno Nugroho
Pemerintah Kabupaten Tuban

ABSTRACT

Coconut Panyuran Beach which is located in Tuban Regency, East Java Province, which is meant on the border of Palang and Tuban Subdistricts, is one of the most famous beach tourism attractions and is visited by many tourists. Based on the potential and opportunities that exist, the development of tourism needs to be done in order to increase economic growth by empowering the people's economy. researchers are interested in knowing how the implementation of tourism development in Tuban Regency, and knowing the right model in developing the tourism potential of Pantai Kelapa in improving the welfare of the surrounding community. This research is a qualitative descriptive study, with research objects in Panyuran and POKDARWIS villages using triangulation techniques.

The results of this study are 1. Implementation of Regional Regulation number 9 of 2012 concerning Tuban District Spatial Plan for 2012-2032 based on Edware III theory consisting of (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure.

Suggestions, socialization and good host training must be immediately scheduled and carried out to the community around the tourist attractions so that the community is always friendly towards visitors and the Standard Operating Procedure (SOP) needs to be formulated immediately.

Keywords: *Pokdarwis, Coastal Coconut Tourism, Development.*

PENDAHULUAN

Pariwisata Kabupaten Tuban memiliki potensi untuk terus dikembangkan, terbukti dengan kenaikan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tuban setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2015 hingga 2017 di Kabupaten Tuban menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Selama 2015 tercatat jumlah wisatawan mencapai 3.290.503 orang. Terdiri dari 3.290.253 wisatawan domestik dan 250 wisatawan mancanegara. Jumlah ini meningkat pada tahun 2016 dengan peningkatan sebanyak 353.683 sehingga mencapai 3.644.186 wisatawan yang terdiri dari 3.643.614 wisatawan domestik dan 572 wisatawan mancanegara. Pada tahun 2017 jumlah peningkatan yang sangat besar mencapai 1.128.668 sehingga mencapai 4.772.854 orang yang terdiri dari 4.772.288 wisatawan domestik dan 566 wisatawan mancanegara. Secara eksplisit sektor wisata bahari memberikan kontribusi terbesar ketiga yang menjadi tempat favorit berkunjung wisatawan (Data jumlah kunjungan wisatawan, Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, tahun 2015 - 2017).”

Tabel Jumlah Wisatawan Pada Destinasi Wisata Yang Berpotensi

No	Destinasi Wisata	2015	2016	2017
		Wisatawan	Wisatawan	Wisatawan
1.	Makam sunan Bonang	1.529.881	1.781.625	2.078.513
2.	Makam Asmoroqondi	1.830.456	1.888.632	2.064.464
3.	Pantai Boom	254.388	134.416	205.203
4.	Goa Akbar	97.058	98.289	104.808
5.	Makam Bejagung Lor	35.886	84.794	82.690

Sumber: RIPPDA Tahun 2017, Kabupaten Tuban

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Tuban memiliki berbagai potensi wisata yang diminati oleh wisatawan. Tingginya minat wisatawan terhadap obyek wisata di Tuban ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Sesungguhnya berdasarkan potensi di atas, potensi yang dimiliki Kabupaten Tuban sangatlah banyak, namun banyak potensi wisata yang belum dikelola dan dikembangkan dengan baik. Selama ini Pemerintah Kabupaten Tuban membranding atau mencitrakan pariwisatanya di sektor religi. Padahal perlu upaya intensifikasi pengembangan pariwisata di luar sektor itu. Berdasarkan asumsi di atas, salah satu potensi pariwisata yang perlu mendapatkan perhatian adalah wisata bahari.

Wilayah Kabupaten Tuban di bagian pantai utara mempunyai destinasi wisata yang beragam. Di antaranya pantai pasir putih yang ada di kecamatan Jenu, Pantai Boom yang ada di Pusat Kabupaten Tuban, Hutan Mangrove terletak di Kecamatan Jenu, pantai Kelapa di Kecamatan Palang, dan Pantai Sowon yang terletak di Kecamatan Bancar, pantai ini dikelola oleh pihak Perhutani. Destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Tuban kurang mendapatkan perhatian yang lebih, terutama masalah kebersihan.

Sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, namun juga memberikan *multiplayer effect*, artinya memberikan kontribusi terhadap laju perekonomian masyarakat daerah. Sektor pariwisata akan memberikan peluang lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di sekitar destinasi wisata. Misalnya masyarakat dapat menjadi pemandu wisata, pengelola destinasi wisata, penyediaan lahan parkir, petugas penjual tiket, dan lain sebagainya.

Untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata, maka pemerintah daerah Kabupaten Tuban menargetkan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Tuban pada tahun 2015 menargetkan pendapatan pariwisata sebesar Rp.975.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.008.916.090,00. Pada tahun 2016 pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.1.030.000.000,00 dan pendapatan yang diperoleh dari sektor wisata sebesar Rp.1.075.140.750,00. Pada tahun 2017 pemerintah menargetkan pendapatan sektor pariwisata sebesar Rp.910.000.000,00 dan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.1.183.486.060,00. Pada tahun 2017 pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp.1.155.000,000,00 dan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.1.283.576.750,00. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan pendapatan dari sektor pariwisata sebesar Pendapatan ini diperoleh dari lima destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tuban, diantaranya wisata Goa Akbar, Wisata Bektiharjo, Pantai Boom, Pemandian Prataan dan Taman Terminal Wisata. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tuban cukup banyak, namun yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban hanya Goa Akbar, Pantai Boom dan Wisata Bektiharjo saja. (Data Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tahun 2015 - 2017).

Sektor pariwisata juga memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk menyediakan homestay, wisata kuliner yang khas dan peluang usaha transportasi untuk para wisatawan. Tak hanya itu, sektor pariwisata juga akan menstimulasi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata. Hal inilah mendorong pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata. Sebab tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah namun memberikan peluang perekonomian untuk masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar lebih terjamin. Masyarakat sekitar harus dilibatkan secara langsung dalam pengembangan potensi pariwisata.

Agar perkembangan potensi pariwisata menjadi terarah dan tersistem, maka perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk membentuk kebijakan, sehingga arah perkembangan potensi pariwisata dapat berjalan dengan baik. Kebijakan yang dibentuk pemerintah daerah harus mengutamakan kelestarian lingkungan, sehingga dapat berkelanjutan

dalam jangka panjang. Pembentukan kebijakan juga harus diiringi dengan pemenuhan infrastruktur penunjang pariwisata.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pariwisata perlu mengembangkan paket-paket wisata baru seperti agrowisata atau ekowisata. Jenis wisata semacam ini selain tidak membutuhkan modal yang besar juga dapat berpengaruh langsung bagi masyarakat dan dapat diikutsertakan secara langsung serta keuntungan yang diperoleh pun dapat dirasakan oleh masyarakat wilayahnya. Melihat potensi pengembangan wisata diatas, penulis ingin meneliti salah satu destinasi tersebut, yakni Wisata Pantai Kelapa yang terletak di daerah Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang.

Pantai Kelapa Panyuran yang berlokasi di Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur yang termaksud di perbatasan Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban adalah salah satu daya tarik wisata pantai yang sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pantai Kelapa Panyuran itu sendiri memiliki potensi alam yang cukup banyak dan terbilang pantai yang banyak diminati oleh wisatawan nusantara, namun belakangan ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengembangannya yaitu kurangnya atraksi wisata yang dimiliki Pantai Kelapa Panyuran untuk para wisatawan, sehingga kegiatan atraksi disana terbilang minim dan monoton.

Dalam arti wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kelapa Panyuran hanya bisa menikmati keindahan pantainya tanpa ada kegiatan atraksi yang dapat dilakukan atau dinikmati oleh wisatawan demi perkembangan pariwisata di Kelurahan Panyuran khususnya dalam kegiatan wisata bahari. kurangnya atraksi wisata di Pantai Kelapa Panyuran menjadi melatar belakangi adanya penelitian ini yaitu kurangnya peranan pemerintah terhadap kegiatan pengembangan wisata tersebut.

Dalam pengelolaan Pantai Kelapa, Kelompok Sadar Wisata banyak bekerjasama dengan komunitas atau lembaga lain untuk meramaikannya, seperti Komunitas pecinta burung, komunitas pecinta kopi, atlit layar, dan lain-lain. Diantaranya guna pengadaan berbagai macam fasilitas untuk menunjang wisata, seperti halnya arena outbond, flying fox, dan warung-warung makan disekitar pantai.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka permasalahan dirumuskan bagaimana implementasi pengembangan pariwisata, apa saja tantangan dan hambatan dalam pengembangan pariwisata Pantai Kelapa Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?

METODE

Ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus pada keperluan praktis, dalam hal ini model implementasi kebijakan dari George Edward III yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi pengembangan pariwisata di Pantai Kelapa, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Secara operasional proses implementasi kebijakan tidak lepas dari empat faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Lokasi penelitian ini di kawasan wisata Pantai Kelapa, Pemerintahan Kelurahan Panyuran dan POKDARWIS pantai Kelapa Panyuran. Informan ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa maupun Pihak Kelurahan Panyuran di Tuban yaitu Ketua POKDARWIS saudara Muhasan, Kepala Kelurahan Panyuran Edy Basuki, SE. dan Tokoh Masyarakat Saudara Sudir serta Perwakilan pedagang yaitu saudari Ulfah.

TEORI

Wisata

Kata Wisata berasal dari kata bahasa Sanskerta “Vis” juga yang berarti menempatkan, masuk, pergi kedalam, duduk. Kata Vis juga berarti tempat tinggal, rumah (wisma) Dari akar kata Vis berkembang menjadi Vicata (Bahasa Kawi/Jawa kuna yang berarti; berpergian untuk mencari hiburan. Demikian pula “Visit” bahasa Inggris yang berarti mengunjungi/kunjangan, nampaknya berasal dari akar kata “Vis” dalam Bahasa Sansekerta.

Dari segi etimologi kata “Wisata, “Pariwisata, “Visit “semuanya mengandung makna yang kurang lebih sama, yaitu pergi, berkunjung, berjalan berkeliling untuk bersenang-senang dan mencari hiburan. Bersenang senang dan hiburan menjadi kata kunci pengertian Wisata.

Pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata (Pitana I Gde & Gayatri Putu G, 2005 : 43).

Istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, yang komponen-komponennya terdiri dari “pari” yang berarti penuh, lengkap atau berkeliling; “wis(man)” yang berarti rumah, properti, kampung atau komunitas; dan “ata” yang berarti pergi terus-menerus atau mengembara (roaming about). Yang bila dirangkai menjadi suatu kata melahirkan istilah pariwisata, berarti: pergi secara lengkap meninggalkan rumah (kampung) berkeliling terus-menerus (Nyoman S. Pedit, 2002 : 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I, Pasal 1, menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hari Karyono (1997:15) menjelaskan pariwisata secara umum dan teknis, pariwisata adalah: keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Definisi yang lebih teknis pariwisata merupakan rangkaian yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain.

Implementasi Kebijakan

Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik seringkali dikaitkan dengan proses administratif di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya menurut George Edward III (1980:1) yang menyatakan bahwa *“the study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act. The issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of regulatory rule- and the consequences of the policy of the people whom it affects”*. Bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1) komunikasi (*communication*), (2) sumber daya pelaksana (*resources*), (3) disposisi birokrasi (*disposition*) dan (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Komunikasi

Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian yaitu 1) Transmisi, sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau

karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya). 2) Kejelasan (Clarity), kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya adalah: i). kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, sehingga mereka cenderung menyerahkan detail pelaksanaannya pada bawahan; ii) Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; iii). Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut; iv). Kebijakan baru yang para perumus belum terlalu menguasai masalah (tentang ini sering dikatakan sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab); v). Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum. 3) Konsistensi, implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena: i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

Sumberdaya

Dimaksud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III adalah 1) Staff, yang jumlah dan *skills* (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan. 2) Informasi, informasi berbeda dengan komunikasi yang diperlukan di sini adalah: i). informasi yang terkait dengan bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) dan, ii). data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. 3) Kewenangan, yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud membawa kasus ke pengadilan menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dan lain-lain kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain. 4) Fasilitas, kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan seperti ruang kantor, komputer, dan lain-lain.

Disposisi

Dimaksud dengan disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu 1) Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif. 2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan, hal ini meliputi bagaimana penerimaan,

ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan. 3) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana. 4) Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Struktur birokrasi

Dimaksud dengan Struktur Birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Teori George Edward III di atas dalam penelitian ini dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032, khususnya dalam pengembangan penataan kawasan wisata baru dalam hubungannya dengan pengembangan wisata Pantai Kelapa di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban serta tantangan dan hambatan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan SK Kepala Kelurahan Panyuran Nomor 556/01/414.418.01/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Kelapa dan Wisata Religi Sunan Andong Wilis Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang memiliki tugas antara lain mengelola sepenuhnya Wisata Pantai Kelapa dan Wisata Religi Sunan Andong Wilis. Hal ini merupakan model inovasi Kelurahan Panyuran dalam pengembangan Wisata di wilayah Kelurahan Panyuran.

Penelitian ini berusaha membuktikan dengan cara menganalisa bahwa ke empat faktor proses Implementasi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tuban yang studi di Pantai Kelapa Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 akan turut mempengaruhi yaitu (1) Faktor komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi dalam menuju keberhasilan implementasi.

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua POKDARWIS Wisata Pantai Kelapa di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban saudara Muhasan, Hari Senin (15/1/18) diperoleh bahwa komunikasi antara anggota POKDARWIS dalam melaksanakan tugas terjalin dengan baik tanpa adanya hambatan, ada kesulitan atau masalah di tempat wisata pantai Kelapa, bisa langsung dikomunikasi dengan Ketua POKDARWIS untuk didapatkan penyelesaiannya. Demikian pula komunikasi antara POKDARWIS dengan Bapak Edy Kepala Kelurahan Panyuran, semua hal di komunikasikan secara transparan, terbuka dan open manajemen, begitu pula dengan pemilik-pemilik tanah, kapan pun jam berapapun mereka bisa minta data jumlah pengunjung, Parkir, penggunaan Toilet dan sebagainya. Dengan para pedagang maupun juga dengan pengunjung, Ketua POKDARWIS saudara Muhasan menyatakan bahwa masukan atau saran yang konstruktif selalu di harapkan untuk pengembangan ke depan Wisata Pantai Kelapa di Panyuran Kecamatan Palang Tuban.

Termasuk harapan-harapan masyarakat sekitar lokasi wisata, yang mengharapkan wisata pantai kelapa bisa dibuka sampai malam hari, tentunya dengan hias lampu warna-warni yang menawan hati. Di bawah ini akan disajikan foto-foto kondisi tempat wisata Pantai Kelapa di Kelurahan Panyuran Kabupaten Tuban, sebagai berikut:



Sumber Daya

Peran sumberdaya mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumberdaya kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi ada empat faktor yaitu sumberdaya manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan. Peran Sumber Daya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam Surat Keputusan Kepala Kelurahan Panyuran Nomor 556/01/414.418.01/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Kelapa dan Wisata Religi Sunan Andong Wilis Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, seperti Nampak di bawah ini.



Sumber: Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Tahun 2018

Dari lampiran di atas dapat dilihat bahwa Saudara Muhasan sebagai Ketua POKDARWIS di bantu oleh, M. Khanafi sebagai Wakil Ketua, Heri Purnomo, SE sebagai Sekretaris I, Ahmad Lutfi, Amd. Sebagai Sekretaris II, Ahmad Rofig, ST. Sebagai Bendahara I, M. Haryono sebagai Bendahara II serta dalam pelaksana harian di support oleh pokja perkemahan, pokja kios dan souvenir, pokja wahana permainan, pokja sarana prasarana, pokja keamanan, pokja humas dan pokja wisata religi. Semua pokja di atas juga berfungsi sebagai koordinator sehari-hari di wisata pantai kelapa. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pengurus POKDARWIS yaitu dengan mengikuti training-training tentang pengelolaan tempat wisata yang diselenggarakan Asosiasi Pengelola Wisata Desa seluruh Indonesia, maupun pihak Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur, menambah ilmu dan wawasan dalam mengelola wisata pantai kelapa semakin baik dan profesional.

Sumberdaya Anggaran

Anggaran bersumber dari swadaya masyarakat panyuran terutama, pemilik lahan, kelurahan dan donasi dari pengusaha-pengusaha di Kelurahan Panyuran. Setelah Wisata Pantai Kelapa berjalan anggaran juga bersumber dari perolehan karcis tanda masuk, parkir, wahana permainan serta retribusi dari Toilet. Anggaran dilaporkan secara terbuka dan berkala setiap bulan kepada Kelurahan Panyuran, Pemilik tanah serta tokoh-tokoh masyarakat. Dana yang terkumpul tidak serta merta langsung dibagikan kepada pemilik tanah maupun pihak lainnya, akan tetapi dana tersebut dijadikan modal pengembangan Wisata Pantai Kelapa selanjutnya.

Sumberdaya Peralatan

Peralatan-peralatan yang ada di POKDARWIS seperti peralatan safety atau keselamatan yang di laut, Kotak PPPK, Peralatan pemadam kebakaran serta sarana wisata anantara lain perahu wisata, kuda wisata, peralatan outbond, motor wisata serta peralatan pendukung lainnya merupakan milik dan aset POKDARWIS.

Sumberdaya Kewenangan

Pengurus POKDARWIS memiliki kewenangan mengelola Wisata Pantai Kelapa sesuai dengan SK Kepala Kelurahan Panyuran Nomor 556/01/414.418.01/2018 tentang Pengangkatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWI) Pantai Kelapa dan Wisata Religi Sunan Andong Wilis Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Disposisi

Disposisi merupakan sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Tidak hanya kemampuan saja, namun kemauan dan keinginan dari para pelaksana juga sangat diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan peran disposisi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 sebagai yang ada dalam kebijakan dan strategi.

Dalam rangka pengembangan wisata pantai kelapa di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perlu mengambil beberapa kebijakan dan strategi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Panyuran khususnya masyarakat di sekitar tempat wisata dapat terpenuhi. Selain itu dalam pengambilan kebijakan dan strategi kita berlandaskan pada norma-norma universal, Konstitusi, Legislasi/UU, Peraturan, Budaya, norma adat, agama.

Kebijakan

Beberapa kebijakan penting yang harus diambil adalah menetapkan POKDARWIS sebagai satu-satunya pengelola wisata pantai kelapa di Kelurahan Panyuran Kabupaten Tuban; Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada pengunjung wisata pantai kelapa dengan menggandeng pihak asuransi jasa raharja Tuban; Penggunaan dana dan pembagian dana yang berasal atau bersumber dari penghasilan pengelolaan wisata pantai kelapa menggunakan asa transparan dan terbuka; Mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam pengembangan wisata pantai kelapa; POKDARWIS dapat mengkoordinasikan kegiatan pengembangan wisata pantai kelapa dengan menggandeng berbagai lembaga baik pemerintah, swasta maupun pihak lain; Memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan wisata pantai kelapa kepada Kepala Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang secara berkala tiap bulan; Mengutamakan masyarakat yang terdekat dari lokasi wisata Pantai Kelapa sebagai anggota POKDARWIS maupun pedagang.

Strategi

Untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, perlu dioperasionalkan dalam beberapa strategi seperti mendirikan Posko atau Kantor POKDARWIS di lokasi wisata Pantai Kelapa; Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengunjung; Selalu menjaga kebersihan terhadap sampah; Membagi tugas pelaksanaan kerja yang jelas kepada pengurus POKDARWIS maupun anggota sehingga memudahkan melaksanakan tugas sehari-hari; Memerintahkan kepada seluruh pedagang untuk selalu menjaga kebersihan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran serta selalu ramah kepada pengunjung; Menginventarisir semua potensi pengembangan ke depan; Menyediakan obat-obatan, air bersih/ MCK/ sanitasi; Memberikan laporan pertanggung jawaban tugas yang diberikan; Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindak lanjut yang direncanakan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan jika terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi yaitu: Standart Operating Procedure (SOP). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua POKDARWIS saudara Muhasan, Hari Senin (15/1/18) diperoleh hasil bahwa sementara ini POKDARWIS belum membuat *Standart Operating Procedure (SOP)* secara tertulis, hanya saja pada kenyataan kerja sehari-hari sudah ada pembagian tugas secara jelas kepada masing-masing pengurus POKDARWIS, maupun anggotanya sehingga tidak ada tumpang tindih tugas. Semua sudah memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaannya sendiri-sendiri. Ke depan akan diadakan

rapat dengan Pemerintah Kelurahan sekaligus penetapan *Standart Operating Procedure* (SOP) nya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hal komunikasi, implementasi Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, tercermin pada pembentukan POKDARWIS dalam pengelolaan wisata Pantai Kelapa yang dalam pelaksanaan sehari-hari Komunikasi antara Ketua dan pengurus lainnya berjalan sangat baik, begitu pula komunikasi dengan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan, apalagi dengan masyarakat sekitar dan para pedagang yang ada di lingkungan wisata. Dalam hal sumber daya, terdapat empat faktor yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 dibagi menjadi enam Wilayah Pengembangan (WP). Dengan mengikuti training-training tentang pengelolaan tempat wisata yang diselenggarakan Asosiasi Pengelola Wisata Desa seluruh Indonesia, maupun pihak Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur, menambah ilmu dan wawasan dalam mengelola wisata pantai kelapa semakin baik dan profesional. Dalam hal disposisi, peran disposisi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 dibagi menjadi enam Wilayah Pengembangan (WP) di Pengembangan wisata Pantai Kelapa di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terdiri dari : Kebijakan dan strategi, Perencanaan Bidang yang terdiri dari Situasi, Sasaran dan Kegiatan, Kebutuhan dan Sumberdaya, serta Pemantauan dan Rencana Tindak Lanjut. Dalam hal struktur birokrasi, bahwa *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk POKDARWIS ternyata belum membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) secara tertulis.

Saran

Dalam hal komunikasi, sebaiknya sosialisasi dan latihan menjadi tuan rumah yang baik harus segera diagendakan dan dilaksanakan kepada masyarakat di sekitar tempat wisata agar masyarakat senantiasa bersikap ramah terhadap pengunjung. Dalam hal sumber daya, untuk menambah jumlah personil POKDARWIS perlu melibatkan organisasi kepemudaan dan Pemerintahan Kelurahan, Karang Taruna maupun tokoh masyarakat sehingga mengurangi kecemburuan sosial. Pengusaha-pengusaha yang berada dalam satu Kelurahan Panyuran perlu dilibatkan untuk investasi pengembangan wisatanya sehingga bisa lebih cepat pelaksanaannya. Perlu pengusulan anggaran dari APBD Kabupaten Tuban maupun CSR Perusahaan-perusahaan Besar yang ada di Kabpaten Tuban. Dalam hal disposisi, perlu diadakan pelatihan TOT (*Training or Trainer*) bagi pengurus POKDARWIS. Dalam hal struktur birokrasi, maka *Standart Operating Procedure* (SOP) perlu segera dirumuskan dan dibuat dan ditempel sehingga dapat segera menjadi pedoman kerja bagi pengurus maupun anggota POKDARWIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanafiah, (2004), *Format-format Penelitian Sosial*. Grafindo Persada, Jakarta
- Gromang, Frans, (2003), *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT Perca.
- Gurfenita, W, (2010), *Manajemen Strategi Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Dalam Pengembangan Wisata Di Kabupaten Karimun*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Harikaryono, A, (1997), *Kepariwisataaan*. Jakarta: Gramedia.

- Hanafi, FR, (2011), *Penentuan Prioritas Pembangunan Pariwisata Di Pulau Lombok Dengan Menggunakan Metode Location Quotient (Lq) Dan Analytic Network Process (Anp)*, FTI ITS, Surabaya.
- Herdiansyah Haris, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- IG & Diarta, IKS, (2009), *Pengantar Ilmu Pariwisata*, penerbit Andi, Yogyakarta.
- J Moelong, Lexi, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartajaya, Hermawan Y, (2005), *Attracting Tourist Traders Investors; Strategi Memasarkan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasiyanto, M.J, (1994), *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Moleong Lexy, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy, (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, (2003), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Semarang
- Oka A, Yoeti, (1985), *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Purwo Santoso, (dibantu Joash Tapiheru), (2010), *Analisis Kebijakan Publik, Research Center for Politik and Government*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Sarantakos, Sotirios, (1993), *Social Research*, Mac Milan Education Australia Pty Ltd, South Moulbourne
- Setyorini, (2011), *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Hotel Mahkota Di Pangkalan Bun*, Socioscintia, Pangkalan Bun.
- Situmorang, SH, (2008), *Destination Brand: Membangun Keunggulan Bersaing Daerah*, WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.2, Edisi Desember, Medan.
- Soetomo, A, (1989), *Pendidikan Kepariwisataaan*. Aneka, Jakarta.
- Suwantoro, Gamal, (1997), *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset
- Spillane, J, (1989), *Ekonomi Pariwisata*, Kanisius, Bandung.
- Wiwoho, B., Pudjawati, R., dan Himawati, Y., (1992), *Pariwisata Citra dan Pemanfaatannya*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Yin, Prof. Robert K, (2006), *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Pitana,
- Yoeti, O, (2010), *Dasar-dasar Pengertian Hospitaliti dan Pariwisata*, PT Alumni Bandung, Bandung.
- Yoeti, O, (1996), *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.
- Zain, (2010), *Pengembangan Potensi Wisata Alam Kabupaten Tulungagung dengan Sstem Informasi Geografis*, FTSP ITS, Surabaya.
- Perda nomor 4 tahun 2013 tentang *penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Tuban*
- SK Kepala Kelurahan Panyuran Nomor 556/01/414.418.01/2018 tentang *Pengangkatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWI) Pantai Kelapa dan Wisata Religi Sunan Andong Wilis Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*